

HEGEMONI REZIM POLITIK DI RANAH LOKAL : STUDI KASUS DI KABUPATEN PATI DI BAWAH KEPEMIMPINAN HARYANTO

Aninditya Normalitasari

aninditalita79@gmail.com

Laila Kholid Alfirdaus, S.IP, M.PP

alfirdaus_laila@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana kekuasaan rezim politik lokal terbentuk dan bekerja dengan studi kasus Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 dengan menggunakan perspektif teori *Power Cube* (Kubus Kekuasaan). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini ialah rezim politik lokal dapat terbentuk karena adanya aktor-aktor lokal di daerah dan dapat bekerja karena ada kekuasaan yang dimilikinya. Aktor dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dalam birokrasi, Aktor-aktor itu pun terdiri dari aktor formal dan aktor informal. Aktor formalnya seperti DPR, Forkopimda dan aktor non formalnya seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam mempertahankan kekuasaannya seorang penguasanya dalam hal ini Bupati Pati disamping menggunakan kekuasaan formalnya sebagai seorang pejabat ia juga memanfaatkan peran-peran aktor-aktor informal dalam ruang tertutup kekuasaan. disamping itu, penguasa juga menggunakan ruang terbuka sebagai simbol kekuasaan yang demokratis untuk meraih simpati dan wujud partisipasi masyarakat yang mereka wakili.

Kata Kunci: Kekuasaan Tertutup, Aktor formal dan Informal, Power Cube

**Hegemony Regime Of A Political In The Local State : A Casing Study in Pati Regency by
Haryanto Leadership**

Aninditya Normalitasari

aninditalita79@gmail.com

Laila Kholid Alfirdaus, S.IP, M.PP

alfirdaus_laila@yahoo.com

Department of Politics and Government of FISIP UNDIP Semarang

ABSTRACK

This research explains how the power of local political regimes is formed and works about the study of the Pilkada Pati Regency in 2017 of the perspective of the Power Cube theory. This research method uses the descriptive qualitative research methods in studying cases. The result of this research is about the political regimes can be formed because of the local workers presence in this region and the power of workers that cannot be separated in the bureaucracy. Formal workers such as DPR, Forkopimda, is non workers such as community and religious leader. For this responbly it is Led by the Regent of Pati beside using his formal assignment he also use informal workers in closing place to take the authorities as the democracy symbol and to keep the sympathy and participation from the community

Keywords: Closed Power, Formal and Informal Actors, Power Cube

A. PENDAHULUAN

Pada era kontemporer, berbagai negara di dunia telah percaya bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien untuk diterapkan. Begitu juga di Indonesia sejak era kemerdekaan. Namun seiring berjalannya waktu, sistem demokrasi di Indonesia mengalami berbagai macam benturan sehingga pelaksanaannya tidaklah mudah. Berbagai proses dan perjuangan harus dilalui Indonesia dalam mencapai demokratisasi. Di Indonesia demokratisasi hadir setelah jatuhnya rezim Soeharto, yang kemudian disebut dengan era reformasi.

Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah inovasi yang bermakna proses konsolidasi demokrasi di aras lokal. Ada sejumlah keunggulan dalam sistem pemilihan kepala daerah langsung dibandingkan dengan sistem rekrutmen politik yang ditawarkan oleh model sentralistik menurut UU No. 5 tahun 1974 atau model demokrasi perwakilan yang diretas oleh UU No. 22 Tahun 1999.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah langsung dapat memberikan manfaat dan harapan bagi pertumbuhan dan perluasan demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah langsung akan menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik ditingkat lokal, daripada sistem demokrasi perwakilan yang hanya meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik ditangan segelintir orang. Melalui konsep demokrasi langsung warga akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik.

Berawal dari pemindahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada pemerintah yang lebih rendah secara langsung akan menciptakan posisi baru dalam birokrasi. Demokrasi yang berlangsung dilokal memang dapat memberi ruang bagi warga setempat untuk berpartisipasi, tetapi disisi lain kontrol elite atas politik lebih sering di dominasi daripada kontrol warga terhadap urusan publik. Padahal seharusnya pemerintah daerah diberi peluang untuk bertindak sebagai pengawal dan pengawas struktural bagi pemerintah pusat dari tindakan-tindakannya yang dapat menumbuhkan rezim lokal.

B. LANDASAN TEORI

1. Power Cube (Kubus Kekuasaan)

Dalam teori ini kekuasaan dipahami sebagai kontrol seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lainnya, dan kerangka pemikiran untuk menganalisis tiga dimensi kekuasaan yang terdiri dari tiga sisi, yaitu level, ruang, bentuk. Dimensi pertama menjelaskan mengenai kekuasaan yang berfokus hanya pada satu hal saja, seperti tindakan para aktor. Kemudian dimensi kedua berfokus pada kepentingan subjektif dalam bentuk pilihan atau keluhan. Sedangkan dimensi ketiga menjelaskan mengenai aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik sekaligus melihat kontrol terhadap agenda tersebut.

Hal-hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor di dalamnya, persoalan, dan situasi yang melatarbelakanginya, dapat dilihat menggunakan teori ini. Para aktor dan juga elite mempunyai posisi dan memainkan peran yang kuat. Dan membagi kekuasaan menjadi pokok pembahasan di kekuasaan daerah, yaitu kekuasaan yang terlihat, kekuasaan yang tersembunyi, dan kekuasaan yang tidak terlihat. Dengan menggunakan simbol kubus artinya suatu hubungan antara yang

satu dengan lainnya saling berhubungan, berinteraksi, dan juga mempengaruhi satu dengan lainnya (Halim,2014:79).

Didalam dimensi kubus kekuasaan ini penciptaan ruang dan waktu merupakan bagian yang penting. Dengan adanya penciptaan ruang dan waktu, dapat dijadikan suatu fokus kajian untuk melihat fenomena-fenomena dari beberapa aspek dan kekuasaan, memetakan faktor yang mempunyai peran penting dalam kekuasaan, aktor-aktor yang ada didalamnya, dan alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Menurut Foucault dan Mudhofir (2013:80,Vol.18), disebutkan ada tiga proposisi mengenai apa itu kekuasaan, diantaranya:

1. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam, melainkan kekuasaan itu dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
 2. Relasi kekuasaan bukankah relasi struktural.
 3. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
2. Kepemimpinan

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia merupakan suatu jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dibidang pemerintahan atau dikatakan sebagai kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan seperti Bupati, Walikota dan Gubernur. Objek formal kepemimpinan pemerintahan adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini yang memimpin adalah pemerintah, sedangkan yang dipimpin adalah rakyat, kemudian objek materialnya adalah manusia.

Kepemimpinan pemerintahan berhubungan dengan istilah memimpin dan memerintah. Kata kepemimpinan terbentuk dari kata memimpin yang artinya kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang. Menggerakkan dan mengarahkan berarti telah berlangsung suatu hubungan manusiawi antar orang perorang, yaitu antara yang menggerakkan dan yang mengarahkan guna mencapai tujuan tertentu.

Ada 4 komponen yang selalu terkait dengan kepemimpinan yaitu, influencer dari dalam diri pemimpin, influencer dari bawahan, teknik mempengaruhi dan situasi (Ambar, 2008). Menurut Kartono (2005:36-38), persyaratan kepemimpinan mencakup tiga hal penting, yaitu (1) kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang berarti kewenangan seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi dan menggerakkan bawahan supaya dapat melakukan sesuatu, (2) keunggulan dan kelebihan, yaitu pemimpin yang dapat mengatur bawahan sehingga mampu patuh dan bersedia melakukan perbuatan tertentu, (3) kemampuan, yaitu segala kesanggupan dan ketrampilan teknis yang di miliki bawahan (Pasollong, 2013).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok melalui wawancara pada informan terkait yaitu Bupati Pati, Mantan Wakil Bupati Pati, LSM, Tokoh Masyarakat. Telaah dokumen juga digunakan untuk menambah data dari arsip, dokumen, maupun dokumen pendukung lainnya yang kemudian dilakukan analisis dari sumber data yang diperoleh.

D. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

1. *Terbentuknya Rezim Politik Lokal Melalui Peran Aktor Lokal Dalam Pilkada*

Pilkada merupakan ajang kontestasi yang penting yang biasa digunakan seseorang hanya mengandalkan popularitas dan figure yang mampu bersaing dalam pilkada. Selain peran figure kandidat, peran dukungan politik dan ekonomi serta aktor-aktor sosial politik juga merupakan hal yang penting. Pilkada merupakan suatu fenomena politik yang tampak bertolak belakang antara para elit untuk bersaing secara sengit namun sekaligus saling bekerjasama. Pemilukada merupakan sebuah proses perwujudan demokrasi di tingkatan lokal dalam rangka memilih kepala daerah secara langsung oleh warganya untuk mencari sosok pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Pilkada selalu ditandai dengan adanya peran elit lokal. Elit lokal mempunyai power (kekuasaan) untuk melakukan suatu tindakan. Elit dan kekuasaan merupakan 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Pilkada di Pati diikuti oleh kandidat yang memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat. Kandidat yang memiliki popularitas yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat. Selain faktor popularitas dan figure, dukungan politik yang dimiliki pun kuat. Banyak partai politik yang merapat ke kandidat. Aktor-aktor sosial politik yang ada juga cukup membantu untuk memperebutkan kekuasaan. Aktor yang terlibat merupakan orang-orang terpilih yang dianggap mampu memberi pengaruh dalam lapisan masyarakat.

Dengan tujuan utamanya untuk menaklukkan kekuasaan atau mengambil bagian dalam pelancaran kekuasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Nyarwi bahwa terdapat makna penting kemenangan pilkada bagi partai politik, yaitu : *Pertama*, memperebutkan kekuasaan eksekutif di daerah, karena arena aksekutif lah yang nantinya bisa menjalankan kebijakan dan visi-misi politik. *Kedua*, sebagai peluang dalam proses

pembelajaran politik untuk kader partai politik. *Ketiga*, sebagai arena untuk menjaring para kader potensial yang populer. Didalam negara yang menggunakan sistem demokrasi, partai politik memegang peranan penting. Partai politik dapat dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai politik pada dasarnya lebih berorientasi pada kekuasaan dibandingkan dengan kebijakan publik. Dalam masyarakat modern, peran partai politik seringkali melakukan agregasi kepentingan.

Pilkada di Pati pada tahun 2017 hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, dan harus berlawanan dengan kotak kosong, namun hal tersebut membawa keuntungan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Apalagi kandidat merupakan seorang petahana yang sudah pasti memiliki basis sumber daya politik yang baik, dan sudah dikenal oleh masyarakat. Banyak partai politik merapat untuk mendukung. Dari 7 partai politik, 6 diantaranya menjadi pengusung yaitu partai PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, P3, PKS. Dan satu partai politik yaitu partai Nasdem tidak turut mengusung calon tersebut, karena partai tersebut mempunyai calon sendiri, tetapi karena tidak kuorum maka hal tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Kemudian, dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi pemilihan umum kepala daerah, setiap kandidat harus memiliki modalitas. Karena modalitas merupakan hal yang harus dimiliki para kandidat selain popularitas dan figure. Menurut Kacung (2006:89) ada tiga modal yang dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam mendapatkan dukungan, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat, maka semakin besar pula dukungan yang di peroleh.

Beragam sumber daya mobilisasi yang dilakukan menjelang pilkada dahulu. Para pejabat berbondong-bondong menyalurkan sumber daya dan energi yang dimiliki untuk

mendukung kampanye sang calon. Dengan maksud setelah pilkada nanti dan calon yang didukung jadi maka akan mendapatkan posisi yang aman. Hak prerogatif seorang pejabat politik adalah melakukan mutasi jabatan semacam gubernur, bupati, dan walikota. Mutasi atau penempatan seseorang dalam posisi tertentu bisa dilakukan dengan objektif apabila selalu koordinasi dengan pihak terkait. Sama halnya dengan jual beli jabatan yang marak terjadi di berbagai daerah. Selain persyaratan administrasi, kemampuan dan track record pejabat yang akan ditempatkan juga wajib dipertimbangkan. Karena prinsip-prinsip seorang PNS adalah profesionalisme, kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat dan tanpa diskriminasi yang meliputi ras, agama, dan suku bangsa. Namun dalam realitanya selalu ada yang mempengaruhi dan mengesampingkan prinsip-prinsip dasar tersebut. Faktornya berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi sebagai elit politik, pada era demokratisasi dan desentralisasi harus dilakukan melalui proses kompetisi yang ketat diantara individu-individu yang menginginkan posisi tersebut, Keberadaan elit politik lokal pada hakekatnya berkaitan dengan pihak yang mempunyai kewenangan, dan keberadaan mereka yang mempunyai kewenangan hanya akan bermakna manakala dihadapkan pada pihak yang tidak memiliki kewenangan.

2. Analisis Pembentukan dan Hegemoni Rezim Lokal

Mengikuti jalan pikiran teori Po-wercube, kekuasaan politik lokal terbagi ke dalam tiga bagian, yakni kekuasaan yang terlihat, tidak terlihat, dan tersembunyi. Kekuasaan yang terlihat (*visible forms of power*) terwujud dalam kekuasaan yang melembaga, yang secara langsung dapat menentukan arah kebijakan politik. Dalam konteks Pilkada, Parpol pengusung atau lembaga yang mendukung secara langsung terhadap calon Kepala Daerah

dikategorikan dengan kekuasaan “yang terlihat”. Strategi target dalam kekuasaan yang terlihat menyangkut “siapa, apa dan bagaimana”. Hal tersebut dijelaskan oleh John Gaventa sebagai kekuasaan dalam Ruang tertutup Ruang dimaksud adalah sebagai usaha dari pengambil kebijakan untuk mengobservasi, membangun komunikasi hingga mengontrol kekuasaannya. Secara kasat mata, praktik politik yang demikian tidak banyak dikritisi oleh masyarakat. Bahwa di balik dukungan Parpol mayoritas atau kekuatan elite tertentu ada *cost* yang harus dibayar mahal oleh pemenang. Masyarakat juga tidak menyadari bahwa merekalah yang akan menanggung *cost* tersebut

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa rezim politik lokal dapat terbentuk karena adanya aktor-aktor lokal di daerah dan dapat bekerja karena ada kekuasaan yang dimilikinya. Aktor dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dalam birokrasi, Aktor-aktor itupun terdiri dari aktor formal dan aktor informal. Aktor formalnya seperti DPR, Forkopimda dan aktor non formalnya seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kekuasaan dalam ruang tertutup seringkali dijadikan ruang terbentuknya kesepakatan antara aktor formal dan informal. Kesepakatan ini bisa berupa jual beli jabatan maupun politik balas budi yang dilakukan oleh pejabat publik kepada partai politik atau individu yang telah mendukungnya pada saat pencalonan dan munculnya kebijakan-kebijakan tertentu. Kekuasaan menjadi cenderung elitis dan hanya mewakili golongan tertentu.

2. Saran

Pada dasarnya kekuasaan haruslah terbuka agar pemerintahan yang dibangun lebih demokratis dan kebijakan-kebijakan yang muncul sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kekurangan dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan masalah belum adanya temuan berkaitan dengan siapa saja yang menjadi aktor-aktor informal dibalik kemenangan Bupati Pati tahun 2017 dan bagaimana kesepakatan politik yang mereka lakukan. Penelitian ini juga masih belum dapat menjawab interaksi seperti apa yang terjadi antara aktor informal dan formal dan siapa yang sebetulnya mendominasi kekuasaan

DAFTAR PUSTAKA

Ambar, T. 2008. **Kepemimpinan Profesional**. Yogyakarta: Graha Media.

Halim, A. 2014. *Politik Lokal: Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B.

Pasollong, H. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.

Kaloh, P. J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.